



# **RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2025**

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN BENGKALIS**

---

## KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja tahun 2025 sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Rancangan Awal Rencana Kerja ini menyajikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta Rancangan Awal Rencana Kerja serta pendanaan Perangkat Daerah pada tahun 2025 yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja 2025 ini.



Bengkalis, 19 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Bengkalis,

**SALMAN ALFARISI, S.T.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19820519 201102 1 001

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>Daftar Tabel</b>	iii
<b>Daftar Gambar</b>	v
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>9</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis	9
2.2 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah	40
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	54
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	56
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Permasalahan Masyarakat	70
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>71</b>
3.1 Telaahan Kebijakan Nasional Dan Provinsi	71
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	77
<b>BAB IV    RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>82</b>
4.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	82
<b>BAB V    PENUTUP</b>	<b>97</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023	12
Tabel 2.2	Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2023	15
Tabel 2.3	Realisasi Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2023	18
Tabel 2.4	Realisasi Pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2023	21
Tabel 2.5	Realisasi Pelaksanaan Program Hubungan Industrial Tahun 2023	26
Tabel 2.6	Realisasi Pelaksanaan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023	29
Tabel 2.7	Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023	30
Tabel 2.8	Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	31
Tabel 2.9	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026	32
Tabel 2.10	Realisasi Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja Tahun 2023	44
Tabel 2.11	Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja Tahun 2022-2023	44
Tabel 2.12	Perbandingan Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi Riau dengan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023	45
Tabel 2.13	Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2023	53

Tabel 2.14	Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu 2025	58
Tabel 2.15	Usulan Jenis Pelatihan, Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2025 Berdasarkan Skala Prioritas	70
Tabel 3.1	Prioritas Daerah, Rumusan Masalah dan Rumusan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu	80
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2025	80
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2025	81
Tabel 4.1	Rancangan Awal Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis	42
Gambar 2.2.	Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Tujuan Jangka Menengah Tahun 2023 Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja	46
Gambar 2.3.	Dukungan Program Bagi Strategi Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	48
Gambar 2.4.	Dukungan Program Bagi Strategi Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang keseluruhannya akan menuju pada satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja

Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 disusun untuk satu tahun yang memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Tahun Anggaran 2023, strategi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pencapaian Rencana Strategis, serta pagu indikatif yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2025, secara khusus Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan sepenuhnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dari sektor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis memiliki peran strategis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bengkalis yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermartabat, Maju dan Sejahtera” telah melaksanakan serangkaian proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2025 dengan membaurkan proses *Top Down Planning* dengan *Bottom Up Planning*.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 merujuk dan berdasarkan ketentuan-ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2025 adalah

untuk memberikan gambaran secara umum tentang kondisi yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis sampai akhir tahun anggaran 2025 serta agar dapat memberikan gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai berdasarkan target-target kinerja yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2025 antara lain:

- a. Untuk merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan urusan ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
- b. Memberikan informasi yang komprehensif dan terstruktur terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, khususnya yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis kepada Bupati Bengkalis selaku Kepala Daerah.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2025 disusun dengan sistematika penulisan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yakni:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis 2025 serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 yang dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis

2.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

2.5. Penelaahan Terhadap Usulan Permasalahan Masyarakat

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi serta perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 dan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

## **BAB IV RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

## **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah telah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang ada di dalam rencana strategis perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 sebesar Rp. 18.003.807.327,- (delapan belas milyar tiga juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), bertambah Rp. 2.051.364.838,- (dua milyar lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) menjadi Rp. 20.055.172.165,- (dua puluh milyar lima puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh lima rupiah) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 19.455.340.111,- (sembilan belas milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu seratus sebelas rupiah) atau setara dengan 97,01% (sembilan puluh tujuh koma nol satu persen) digunakan untuk mendukung pelaksanaan 7 (tujuh) program 17 (tujuh belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

Secara umum capaian kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan sasaran kinerja program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sebesar 85,04% (delapan puluh lima koma nol empat persen) dengan kategori nilai capaian kinerja “baik”, yakni:

1. Persentase data rencana tenaga kerja daerah pada Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan target 87% (delapan puluh tujuh persen) telah direalisasikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan capaian kinerja setara dengan 80,46% (delapan puluh koma empat puluh enam persen);
2. Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan daya saing dan produktivitasnya pada Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target 20% (dua puluh persen) telah direalisasikan sebesar 15% (lima belas persen) dengan capaian kinerja setara dengan 75% (tujuh puluh lima persen);
3. Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target 83% (delapan puluh tiga persen) telah direalisasikan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dengan capaian kinerja setara dengan 78,31% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh satu persen);
4. Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial pada Program Hubungan Industrial dengan target 93% (sembilan puluh tiga persen) telah direalisasikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan capaian kinerja setara dengan 86,02% (delapan puluh enam koma nol dua persen);
5. Persentase pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi pada Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi dengan target 100% (seratus persen) telah direalisasikan sebesar 75,50% (tujuh puluh lima koma lima puluh persen) dengan capaian kinerja setara dengan 75,50% (tujuh puluh lima koma lima puluh persen);
6. Persentase pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi pada Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan target 100% (seratus persen) telah direalisasikan sebesar 100% (seratus persen) dengan capaian setara dengan 100% (seratus persen);
7. Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dengan target 100% telah direalisasikan sebesar 100% dengan capaian setara dengan 100%.

Dari capaian tersebut beberapa program masih perlu mendapatkan perhatian sangat serius dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni urusan ketransmigrasian. Mengingat perlunya memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis khususnya masyarakat transmigran yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Lebih terperinci capaian dari masing-masing program tersebut adalah:

#### 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/Kota adalah hasil kegiatan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, perkiraan dan rencana kebutuhan tenaga kerja, serta neraca dan program pembangunan ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.

Program Perencanaan Tenaga Kerja merupakan program yang mengakomodir kegiatan penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro. Dokumen tersebut berisi rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dengan target keluaran 1 (satu) dokumen. Didukung alokasi pendanaan sebesar Rp. 223.799.800,- (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan capaian kinerja 80,46%

(delapan puluh koma empat puluh enam persen) dan serapan anggaran sebesar Rp. 220.835.585,- (dua ratus dua puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau setara dengan 98,68% (sembilan puluh delapan koma enam puluh delapan persen).

Tabel 2.1. Capaian Kinerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target		Pagu (Rp)	Hasil		Capaian		Realisasi (Rp)	%
I.	Program Perencanaan Tenaga		87	%	223.799.800	70	%	80,46	%	220.835.585	98,68
1.1	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)										
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokumen	223.799.800	1	Dokumen	100	%	220.835.585	98,68

Tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan program Perencanaan Tenaga Kerja pada tahun 2023, hanya saja pada tahun berjalan hanya satu sub kegiatan yang dilaksanakan yakni sub kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja makro, sedangkan sub kegiatan fasilitasi penyusunan rencana tenaga kerja mikro baru akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Hal tersebut yang mengakibatkan pencapaian target program perencanaan tenaga kerja belum maksimal. Kedepan akan dilakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka meningkatkan pencapaian target program salah satunya adalah dilaksanakannya sub kegiatan fasilitasi penyusunan rencana tenaga kerja mikro dengan indikator keluaran jumlah sumber daya manusia perusahaan yang mampu menyusun rencana tenaga kerja mikro.

## 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki sasaran program meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga

kerja dengan indikator sasaran program persentase tenaga kerja yang ditingkatkan daya saing dan produktivitasnya didukung oleh 3 (tiga) kegiatan yakni Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Kegiatan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil dengan total anggaran Rp. 1.512.662.900,- (satu milyar lima ratus dua belas juta enam ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan anggaran yang harus dikelola sebesar Rp. 1.308.386.900,- (satu milyar tiga ratus delapan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 1.223.956.324,- (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) atau setara dengan 93,93% (sembilan puluh tiga koma sembilan puluh tiga persen) sebagai dukungan pelaksanaan 3 (tiga) sub kegiatan, yakni sub kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, sub kegiatan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja, sub kegiatan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota .

Sub kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi telah melaksanakan 4 (empat) jenis pelatihan yakni *rigger*, *welder*, *digital marketing* dan menjahit yang pada masing-masing jenis pelatihan diikuti sebanyak 20 (dua puluh) orang peserta. Dari total 80 (delapan puluh) orang yang mengikuti 4 (empat) jenis pelatihan tersebut 77 (tujuh puluh tujuh) diantaranya telah lulus mengikuti ujian kompetensi dan mendapatkan sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pelaksanaan pekerjaan pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPTLK) Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis selain memanfaatkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis juga memanfaatkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dengan melaksanakan pelatihan *welder* dan pembuatan roti kue yang masing-masing pelatihan diikuti oleh 16 (enam belas) peserta. Dari 32 (tiga puluh dua) orang peserta pelatihan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional tersebut 31 (tiga puluh satu) orang diantaranya telah lulus mengikuti ujian sertifikasi dan mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam rangka kolaborasi antara Pertamina Hulu Rokan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat Kabupaten Bengkalis pelatihan berbasis kompetensi juga telah dilaksanakan menggunakan anggaran yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pertamina Hulu Rokan. Pelatihan *rigger* dan *welder* dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ketrampilan calon tenaga kerja di bidang minyak dan gas yang diikuti oleh 23 (dua puluh tiga) orang peserta dan telah 100% (seratus persen) lulus mendapatkan sertifikat ketrampilan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Kedepannya perlu ditingkatkan lagi kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan terkait kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam rangka meningkatkan ketrampilan dan kompetensi para calon maupun tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bengkalis dengan pihak lain baik perusahaan atau akademisi. Salah satunya bisa melalui pola pemagangan calon maupun tenaga kerja yang telah memperoleh pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Diharapkan dengan adanya

pemagangan maka calon atau tenaga kerja terlatih tersebut dapat lebih meningkatkan ketrampilan dan keahlian yang telah diperoleh dari proses pelatihan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.2. Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 2023

No.	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Lulus Sertifikat Dinas	Lulus Sertifikat BNSP	Penempatan	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1	Rigger	20	20	18	2	APBD
2	Digital Marketing	20	20	20	8	APBD
3	Welder	20	20	20	3	APBD
4	Ketrampilan Menjahit	20	20	19	5	APBD
		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>77</b>	<b>18</b>	
5	Welder	16	16	15		APBN
6	Pembuatan Roti Kue	16	16	16		APBN
		<b>32</b>	<b>32</b>	<b>31</b>		
7	Rigger	17	17	17		CSR PHR
8	Welder	6	6	6		CSR PHR
		<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>135</b>	<b>135</b>	<b>131</b>		

Sumber: Data UPT LK Disnakertrans, 2023 (diolah)

Sub kegiatan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja dilaksanakan dalam rangka penjangkauan dengan lembaga pelatihan kerja lain dari segi penyediaan instruktur yang akan digunakan dalam pelaksanaan pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Dari target 4 (empat) lembaga yang dijajaki untuk koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja telah dicapai target sebesar 100% (seratus persen). Sebagai dukungan pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi maka dilaksanakanlah sub kegiatan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten /kota dengan target 10 (sepuluh) unit pengadaan mesin jahit dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% (seratus persen).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi adalah adanya perubahan

jadwal ketersediaan instruktur pelatihan yang mengakibatkan mundurnya jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan, sehingga target peserta pelatihan yang direncanakan sebesar 180 (seratus delapan puluh) orang hanya dapat terakomodir sebanyak 80 (delapan puluh) orang atau sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) saja. Sebagai antisipasi pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya agar kejadian yang sama tidak terulang maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan koordinasi intensif dengan kelembagaan Kementerian Tenaga Kerja dan pihak—pihak terkait dalam hal ketersediaan instruktur.

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta merupakan salah satu lembaga yang membantu pihak pemerintah dalam menangani masalah tenaga kerja dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang kompeten dalam meningkatkan keahlian dan ketrampilan calon tenaga kerja. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta menjadi lembaga yang akan mewadahi kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan keahlian khusus agar dapat bersaing di era globalisasi industri.

Tahun 2023 anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta adalah sebesar Rp. 105.885.300,- (seratus lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) yang dilaksanakan dalam bentuk identifikasi jenis dan perizinan yang dimiliki oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya terkait dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan. Dari target 7 (tujuh) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang akan dilakukan pembinaan pada akhir tahun 2023 diraih capaian kinerja sebanyak 9 (sembilan) Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang telah dibina dan 3 (tiga) diantaranya telah memiliki status terakreditasi. Dari besaran anggaran yang disediakan pada akhir tahun

2023 telah direalisasikan sebesar Rp. 102.233.300,- (seratus dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) atau setara dengan 96,55% (sembilan puluh enam koma lima puluh lima persen).

Arsyad (2019) mengatakan pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antar pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Saat ini dengan paradigma menempatkan penduduk sebagai subyek pembangunan, maka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi sebagai tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Indikator ketenagakerjaan di suatu wilayah dapat diketahui dengan seberapa besar penduduk yang aktif secara ekonomi sebagai pekerja, seberapa besar tingkat pengangguran dan kondisi lainnya. Pada umumnya permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia seperti Tingkat Pengangguran Terbuka masih tinggi, rasio angkatan kerja dan lapangan kerja tidak sebanding, produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing rendah, serta tingkat upah masih rendah.

Porter (1990) mendefinisikan daya saing sebagai produktivitas, yaitu nilai *output* yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator utama dalam daya saing tenaga kerja. Kemudian peningkatan daya saing tenaga kerja sebenarnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penduduk secara ekonomi sebagai tenaga kerja yang berkualitas sangat membantu pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Kegiatan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil merupakan kegiatan baru yang dilaksanakan di tahun 2023 dengan target capaian 4 (empat) perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitasnya. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk peningkatan efisiensi, peningkatan kesejahteraan karyawan, penyempurnaan skalabilitas dan meningkatkan kinerja karyawan maupun perusahaan. Dari target kinerja 4 (empat) perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas maka pada akhir tahun 2023 telah dicapai sebesar 100% (seratus persen) dengan serapan anggaran sebesar Rp.94.700.700,- (sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu tujuh ratus rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp.98.390.700,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau setara dengan 96,25% (sembilan puluh enam koma dua puluh lima persen). Karena kegiatan baru dilaksanakan pada tahun 2023 maka efektifitas kegiatan belum dapat dirasakan secara signifikan dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang ada pada perusahaan-perusahaan skala kecil yang ada di Kabupaten Bengkulu. Perlu dilakukan kajian lebih dalam sehingga dapat ditemukan formasi yang lebih tepat dalam rangka pelaksanaan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bengkulu.

Tabel 2.3. Realisasi Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target		Pagu	Hasil		Capaian		Realisasi	%
I.	Program Pelatihan Kerja dan Priduktivitas Tenaga Kerja		20	%	1.414.272.200	15	%	75,00	%	1.326.189.624	93,77
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi										
1.1.	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Tahun n	140	orang	1.029.919.300	80	orang	57	%	1.003.531.734	97,44

No	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target		Pagu	Hasil		Capaian		Realisasi	%
1.2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam Rangka Optimaliasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pada Tahun n	4	Lembaga	106.548.900	4	Lembaga	100	%	102.724.690	96,41
1.3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten /Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	10	Unit	171.918.700	10	unit	100	%	117.699.900	68,46
2.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										
2.1	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Yang Dibina	7	Lembaga	105.885.300	9	Lembaga	129	%	102.233.300	96,55
3	Konsultansi produktivitas pada Perusahaan Kecil										
3.1	Pelaksana Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	4	Perusahaan	98.390.700	4	Perusahaan	100	%	94.700.700	96,25

### 3. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja merupakan program yang mengakomodir kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan administrasi kartu pencari kerja (AK1) bagi para calon tenaga kerja dan *job fair* atau bursa kerja. Dukungan pendanaan diberikan sebesar Rp. 283.126.100,- (dua ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu seratus rupiah) telah dilaksanakan dengan capaian kegiatan sebesar 78,31% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh satu persen) dan serapan anggaran sebesar Rp. 279.741.300,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh

ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah) atau setara dengan 98,80% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh persen).

Tercatat 1.505 (seribu lima ratus lima) orang telah mendaftarkan diri dalam proses pelayanan administrasi kartu pencari kerja (AK1) dari 5000 (lima ribu) orang yang ditargetkan dalam sub kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online atau hanya 30% (tiga puluh persen) capaian yang dihasilkan dari target perencanaan. Realisasi yang dihasilkan masih jauh dari yang ditargetkan sehingga perlu diambil langkah-langkah nyata dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan proses pelayanan administrasi kartu pencari kerja (AK1). Hal tersebut terkait dengan belum adanya aturan yang tegas terkait kewajiban memiliki kartu pencari kerja (AK1) bagi calon pencari kerja dan kewajiban melaporkan status pekerjaan jika calon pencari kerja telah mendapatkan pekerjaan. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap aturan yang telah dilaksanakan terkait proses pelayanan administrasi kartu kuning sehingga tertib administrasi yang diharapkan dari proses pelayanan administrasi kartu pencari kerja (AK1) dapat tercapai.

Sedangkan pada pelaksanaan bursa kerja (*job fair*) tahun 2023 telah dibuka kurang lebih 1.041 (seribu empat puluh satu) peluang kerja dari berbagai sektor dengan calon pencari kerja yang mendaftar secara *online* kurang lebih sebanyak 5000 (lima ribu) orang. Minimnya ketrampilan yang dimiliki oleh calon pencari kerja masih menjadi kendala dalam memenuhi peluang kesempatan kerja yang telah dibuka pada kegiatan bursa kerja yang dilaksanakan.

Secara umum kendala yang dihadapi tidak ada hanya saja diperlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan bursa kerja (*job fair*) baik dalam sistem penyampaian informasi kegiatan, sistem pendaftaran peserta maupun calon pencari kerja dan penanganan pelaksanaan kegiatan. Kedepan diharapkan pelaksanaan bursa kerja

(*job fair*) lebih mengedepankan faktor keamanan dan kesehatan masyarakat calon pencari kerja.

Tabel 2.4. Realisasi Pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2023

No	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Pagu	Hasil	Capaian	Realisasi	%
I.	Program Penempatan Tenaga Kerja		83 %	283.126.100	65 %	78,31 %	279.741.300	98,80
1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja							
1.1.	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	5000 orang	104.722.200	1505 orang	30 %	103.844.400	99,16
1.2.	Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 orang	178.403.900	100 orang	100 %	175.896.900	98,59

#### 4. Program Hubungan Industrial

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Beberapa jenis perselisihan hubungan industrial yang umumnya terjadi antara buruh dengan pengusaha antara lain:

1. Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
2. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
4. Perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan serikat pekerja/ serikat buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.

Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial, yaitu perundingan bipartit, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Namun bila tetap tidak menemui kesepakatan maka tidak menutup kemungkinan akan berlanjut hingga pengadilan khusus perselisihan hubungan industrial.

Sepanjang tahun 2023 dari 14 (empat belas) kasus yang ditargetkan untuk dapat dicegah direalisasikan sebesar 24 (dua puluh empat) perkara yang capaian kinerjanya setara dengan 171% (seratus tujuh belas persen), dan dari 16 (enam belas) perkara yang ditargetkan dapat diselesaikan direalisasikan sebanyak 24 (dua puluh empat) perkara atau capaiannya setara dengan 150% (seratus lima puluh persen). Dari 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) perusahaan yang menjadi target untuk menyusun Perjanjian Kerja Bersama hanya 1 (satu) perusahaan yang memperbaharui status Perjanjian Kerja Bersama atau setara dengan 0,06% (nol koma nol persen) saja. Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau

perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja Bersama dirundingkan oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Jika di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan, maka serikat pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama dengan pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat dukungan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara. Apabila di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, maka serikat pekerja/serikat buruh yang berhak mewakili pekerja/buruh dalam melakukan perundingan dengan pengusaha adalah maksimal 3 (tiga) dipilih berdasarkan anggota terbanyak) serikat pekerja/serikat buruh yang masing-masing anggotanya minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama sekurang-kurangnya harus memuat nama, tempat kedudukan serta alamat serikat pekerja/serikat buruh; nama, tempat kedudukan serta alamat perusahaan; nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerja/serikat buruh bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota; hak dan kewajiban pengusaha; hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya Perjanjian Kerja Bersama; dan tanda tangan para pihak pembuat Perjanjian Kerja Bersama. Perjanjian Kerja Bersama ditandatangani oleh direksi atau pimpinan perusahaan, ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun

terhitung sejak ditandatangani atau diatur dalam ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Bersama. Pengusaha mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan melampirkan naskah Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh diatas meterai cukup, form Pengajuan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (Sumber: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama).

Program hubungan industrial telah menyerap anggaran sebesar Rp. 5.785.763.500,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) atau setara dengan 99,33% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.824.991.300,- (lima milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah). Anggaran tersebut digunakan sebagai dukungan pelaksanaan kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Berpotensi dalam 1 Daerah Kab./Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam bentuk disahkannya peraturan perusahaan bagi perusahaan, pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan, penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit.

Selain kegiatan pencegahan dan penyelesaian kasus hubungan industrial, Program Hubungan Industrial juga mengakomodir pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berupa dukungan dana untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

bagi 24.000 (dua puluh empat ribu) orang masyarakat rentan selama 12 (dua belas) bulan dengan total anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 4.830.638.400,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dari Rp. 4.838.400.000,- (empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang telah dianggarkan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Bengkalis. Menurut catatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Kota Duri menyatakan bahwa pada akhir tahun 2023 sudah dilakukan klaim sebesar 2,6 Milyar untuk memberikan santunan bagi 60 (enam puluh) orang yang mengalami kematian mendadak dan 1 (satu) orang yang mengalami kecelakaan kerja di Kabupaten Bengkalis.

Dengan adanya program Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi masyarakat rentan ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis dinilai peduli terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja khususnya pekerja rentan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Hingga pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapatkan penghargaan Paritrana Award Peringkat I se-Provinsi Riau yang diserahkan kepada Bupati Bengkalis pada 31 Agustus 2023. Dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau hanya 3 daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut, diantaranya Kabupaten Bengkalis sebagai terbaik pertama, Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai terbaik kedua dan Kota Pekanbaru sebagai terbaik ketiga. Upaya memperluas cakupan kepersertaan dan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bertumpu pada peran aktif berbagai pemangku kepentingan. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan dalam meningkatkan cakupan tersebut antara lain melalui

sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat.

Paritrana Award merupakan ajang penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pelaku usaha meliputi perusahaan skala besar, menengah, usaha sektor layanan publik dan usaha mikro yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan periode penilaian Januari sampai dengan Desember. Dengan Bengkalis mendapatkan peringkat pertama di tingkat Provinsi Riau pada Paritrana Award tahun 2023 maka hal ini menjadi pemicu bagi pemerintah kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau untuk dapat mengikuti jejak langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam rangka menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja masyarakat yang ada di wilayah pemerintahannya.

Tabel 2.5. Realisasi Pelaksanaan Program Hubungan Industrial Tahun 2023

No	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target		Pagu	Hasil		Capaian		Realisasi	%
I.	Program Hubungan Industrial		93	%	5.824.991.300	80	%	86,02	%	5.785.763.500	99,33
1.	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Berpotensi dalam 1 Daerah										
1.1.	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	237	Perusahaan	84.160.200	21	Perusahaan	9	%	83.020.200	98,65
1.2.	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	237	Perusahaan	67.720.200	1	Perusahaan	0	%	67.720.200	100,00
1.3.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI/(PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	Laporan	5.066.707.000	1	Laporan	100		5.057.358.400	

No	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target	Pagu	Hasil	Capaian	Realisasi	%		
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di									
2.1	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kab./Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	14	Perkara	188.793.600	24	Perkara	171 %	162.083.200	85,85
2.2	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1(satu) Daerah Kab./Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselasaian	16	Perkara	139.667.700	24	Perkara	150 %	138.480.100	99,15
2.3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Paerusahaan, Pederasi dan Konfederasi Serikat Kerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	50	Asosiasi dan serikat pekerja	80.703.600	20	Asosiasi dan serikat pekerja	40 %	80.125.600	99,28
2.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab./Kota	Jumlah LKS Tripartit yang di bina	2	Lembaga	197.239.000	1	Lembaga	50 %	196.975.800	99,87

## 5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi

Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi menangani masalah legalitas status kawasan transmigrasi yang berlokasi di Desa Cingam dan Makeruh. Pada akhir tahun 2022 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Satuan Permukiman Transmigrasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Satuan Permukiman

Tahun 2022 dengan parameter dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan sarana, dan kelembagaan, dan hasil rapat penentuan lokus Satuan Permukiman yang akan dialihkan pengembangannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disepakati 30 (tiga puluh) Satuan Permukiman yang telah mencapai tahap kemandirian, perlu diserahkan pelaksanaan pengembangannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berarti bahwa tanggung jawab dan pembinaan kawasan tersebut beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten Bengkalis nilai Indeks Penilaian Satuan Permukiman adalah 75,47 (tujuh puluh lima koma empat puluh tujuh) dengan status utama/kemandirian dengan indikator yang perlu ditingkatkan adalah pelayanan bank, promosi dan pelibatan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengembangan pola usaha pokok dan komoditas unggulan.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2022 dicantumkan Kecamatan Rukat dan Rukat Utara, Desa Makeruh terdapat 43 (empat puluh tiga) kepala keluarga yang status pembinaan dan pengembangannya dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut terkait perubahan status tersebut khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan asset Barang Milik Negara yang terdapat di Desa Makeruh.

Program perencanaan kawasan transmigrasi mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 163.627.300,- (seratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang telah direalisasikan sebesar Rp. 143.456.159, (seratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah) dengan capaian 1 (satu) dokumen. Namun dalam pencapaian kinerja program perencanaan kawasan transnmigrasi yang ditargetkan 100%

(seratus persen) hanya tercapai 75,50% (tujuh puluh lima koma lima puluh persen) dikarenakan dokumen legalitas status lahan transmigrasi belum dapat terselesaikan.

Tabel 2.6. Realisasi Pelaksanaan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023

No	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target		Pagu	Hasil		Capaian		Realisasi	%
I.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi		100	%	163.627.300	75,50	%	75,50	%	143.456.159	87,67
1.	Kegiatan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi										
1.1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1	Dokumen	163.627.300	1	Dokumen	100	%	143.456.159	87,67

## 6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) memiliki berbagai definisi dalam perkembangannya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk kebermanfaatannya generasi sekarang dan generasi masa depan. Tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki 3 (tiga) aspek khusus yaitu keberlanjutan pertumbuhan yang tinggi (*economic growth*), keberlanjutan kesejahteraan yang adil dan merata (*social progress*), serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*). Dari definisi tersebut, pembangunan

berkelanjutan secara garis besar berkonsentrasi kepada 3 (tiga) pilar yakni pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dengan memperhatikan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Cingam maupun Desa Makeruh maka dilaksanakan pelatihan-pelatihan sederhana bagi masyarakat transmigrasi yang diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Tahun 2023 telah dilaksanakan pelatihan pembuatan kerajinan dari lidi sawit dan pembuatan roti kue bagi 16 (enam belas) orang warga transmigrasi yang ada di Desa Cingam dan Desa Makeruh. Alokasi anggaran sebesar Rp. 139.088.200,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) telah direalisasikan sebesar Rp. 138.808.600,- (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu enam ratus rupiah) atau setara dengan 99,80% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh persen) dengan capaian kegiatan sebesar 100% (seratus persen). Perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih beragam terkait jenis pelatihan dan penyaluran hasil pelatihan sehingga pelaksanaan program lebih dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat transmigrasi yang ada di Desa Cingam maupun Desa Makeruh.

Tabel 2.7. Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Tahun 2023

No	Uraian	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target		Pagu	Hasil		Capaian		Realisasi	%
I.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		100	%	139.088.200	100	%	100,00	%	138.808.600	99,80
1.	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
1.1.	Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigrasi dan /atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	16	Orang	139.088.200	16	Orang	100	%	138.808.600	99,80

Tabel 2.8. Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis

No.	Uraian	APBD Murni	APBD-P	Realisasi	Capaian (%)
1.	Program	7	7	7	100
2.	Kegiatan	17	17	17	100
3.	Sub Kegiatan	39	39	39	100
4.	Total Anggaran (Rp)	18.003.807.327	20.055.172.165	19.455.340.111	97,01
5.	Belanja Pegawai (Rp)	6.241.294.517	7.184.827.355	6.953.551.099	96,78
6.	Belanja Operasi (Rp)	11.762.512.810	12.870.344.810	12.501.789.012	97,14

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis, Desember 2023

Sedangkan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 dan capaian rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 yang disampaikan melalui sistem elektronik monitoring dan evaluasi (e-monev) secara lebih detail dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023  
Dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026



KODE	Sasaran RKP D	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP D Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP D yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP D Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Unit SKPD					
								I		II		III		IV				14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%				
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1,		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA			61.897.647.340,00	-	10.469.127.288,00	11.919.914.565,00	1.287.338.304,00	4.025.899.379,00	2.475.679.947,00	3.676.927,00	11.465.844.643,00	21.934.971.931,00	35,44										Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
01.2.01.01.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		-	-	3 dokumen	190.409.700,00	0 Dokumen	16.680.000,00	1 Dokumen	60.689.900,00	1 Dokumen	51.644.800,00	1 dokumen	64.999.800,00	3,00	194.014.500,00	194.014.500,00	-	-				
01.2.01.06.		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	867.960.000,00	6	158.801.000,00	1 Laporan	36.676.000,00	0 Laporan	20.828.000,00	0 Laporan	9.891.200,00	0	-	1 Laporan	5.561.200,00	1,00	36.280.400,00	7,00	195.081.400,00	19,44	22,48		

KODE	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023	Unit SKPD						
								I		II		III		IV											
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
01.2.02.01.		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		600%	38.856.771.026,00	12	6.099.493.195,00	12 Bulan	7.184.827.355,00	3 Bulan	632.594.927,00	3 Bulan	2.914.512.102,00	3 bulan	1.516.762.468,00	3 Bulan	1.889.681.602,00	12,00	6.953.551.099,00	24,00	13.053.044.294,00	14,30	33,59	
01.2.03.02.		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		214 Orang	3.933.600.000,00	36	691.200.000,00	1 Dokumen	691.200.000,00	0 Dokumen	115.200.000,00	0 Dokumen	172.800.000,00	0 Dokumen	172.800.000,00	1 dokumen	224.000.000,00	1,00	684.800.000,00	37,00	1.376.000.000,00	15,04	34,98	
01.2.05.11.		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		30 Orang	69.762.000,00	13	143.160.684,00	23 Orang	114.412.000,00	1 Orang	6.200.000,00	0 Orang	-	2 Orang	9.750.147,00	7 orang	49.600.000,00	10,00	65.550.147,00	23,00	208.710.831,00	27,37	100,00	
01.2.06.01.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan		145 Jenis	179.400.000,00	11	28.948.000,00	2 Paket	30.765.800,00	0 Paket	9.230.200,00	0 Paket	9.215.500,00	0 Paket	9.223.500,00	2 Paket	3.096.600,00	2,00	30.765.800,00	13,00	59.713.800,00	24,30	33,29	
01.2.06.02.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		72 Bulan	833.706.000,00	12	175.685.800,00	3 Paket	146.836.900,00	0 Paket	44.596.100,00	0 Paket	44.298.600,00	0 Paket	43.337.700,00	3 Paket	14.604.500,00	3,00	146.836.900,00	15,00	322.522.700,00	23,81	38,69	
01.2.06.04.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		72 Bulan	1.280.920.000,00	44	267.230.000,00	2 Paket	302.520.000,00	0 Paket	14.400.000,00	0 Paket	101.500.000,00	0 Paket	61.920.000,00	2 Paket	92.500.000,00	2,00	270.320.000,00	46,00	537.550.000,00	28,82	41,97	
01.2.06.05.		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		116 Jenis	799.362.800,00	18	83.617.800,00	3 Paket	71.719.000,00	0 Paket	12.866.400,00	0 Paket	8.076.100,00	0 Paket	14.774.700,00	3 Paket	13.420.600,00	3,00	49.137.800,00	21,00	132.755.600,00	27,63	16,61	
01.2.06.06.		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		18 Media	119.819.600,00	3	8.650.000,00	1 Dokumen	17.024.600,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	2.100.000,00	0 Dokumen	1.500.000,00	1 dokumen	5.324.600,00	1,00	8.924.600,00	4,00	17.574.600,00	27,09	14,67	
01.2.06.09.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1500 Laporan	3.340.670.000,00	12	709.023.079,00	250 Laporan	895.823.000,00	62 Laporan	146.794.190,00	88 Laporan	215.851.307,00	85 Laporan	199.791.089,00	12 Laporan	276.538.727,00	247,00	838.975.313,00	259,00	1.547.998.392,00	26,19	46,34	
01.2.06.11.		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		146 Orang	1.693.200.000,00	13	281.400.000,00	1 Dokumen	283.200.000,00	0 Dokumen	47.200.000,00	0 Dokumen	70.800.000,00	0 Dokumen	70.800.000,00	1 dokumen	94.400.000,00	1,00	283.200.000,00	14,00	564.600.000,00	24,81	33,35	

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

KODE	Sasaran RKP D	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023	Unit SKPD					
								I		II		III		IV						13	14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						K	Rp	K	Rp
01.2.07.02.		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	-	2 unit	26.100.000,00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	1 unit	25.490.000,00	1,00	25.490.000,00		25.490.000,00	22,90	-		
01.2.07.05.		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	170 Unit	171.402.000,00	23	44.112.000,00	56 unit	84.514.000,00	0 unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	55 unit	83.533.050,00	55,00	83.533.050,00	78,00	127.645.050,00	24,54	74,47	
01.2.07.10.		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	170 Jenis	61.200.000,00	15	114.593.000,00	25 unit	71.036.000,00	0 Unit	-	0 Unit	-	8 Unit	32.378.000,00	6 unit	38.628.000,00	14,00	71.006.000,00	29,00	185.599.000,00	24,04	100,00	
01.2.08.01.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	90 Orang; 15000 Lembar	1.220.563.200,00	16	209.195.120,00	800 Laporan	237.900.000,00	240 Laporan	42.244.000,00	215 Laporan	60.444.000,00	215 Laporan	60.444.000,00	130 Laporan	74.768.000,00	800,00	237.900.000,00	816,00	447.095.120,00	28,79	36,63	
01.2.08.02.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Bulan	2.067.328.434,00	12	260.632.163,00	12 Laporan	311.407.170,00	3 Laporan	50.560.487,00	3 Laporan	74.004.790,00	3 Laporan	63.566.523,00	3 Laporan	62.191.645,00	12,00	250.323.445,00	24,00	510.955.608,00	29,06	24,72	
01.2.08.04.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Orang	115.200.000,00	1	19.200.000,00	1 Laporan	29.231.040,00	0 Laporan	3.200.000,00	0 Laporan	10.616.880,00	0 Laporan	7.299.120,00	1 Laporan	8.071.840,00	1,00	29.187.840,00	2,00	48.387.840,00	29,30	42,00	
01.2.09.02.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	900.000.000,00	6	145.835.500,00	10 unit	237.670.000,00	1 Unit	6.770.000,00	6 Unit	102.544.000,00	1 Unit	51.355.900,00	2 unit	51.644.287,00	10,00	212.314.187,00	16,00	358.149.687,00	30,09	39,79	
01.2.09.06.		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit	200.000.000,00	15	43.998.298,00	40 unit	49.000.000,00	10 Unit	14.850.000,00	10 Unit	19.360.000,00	10 Unit	4.395.000,00	10 unit	10.295.000,00	40,00	48.900.000,00	55,00	92.898.298,00	32,26	46,45	

KODE	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPd Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Unit SKPD								
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp				
01.2.09.09.		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit; 300 Orang	3.986.812.280,00	12	662.552.000,00	6 unit	588.272.000,00	2 Unit	103.124.000,00	2 Unit	149.195.000,00	0 Unit	103.937.000,00	2 unit	271.822.000,00	6,00	628.078.000,00	18,00	1.290.630.000,00	32,15	32,37									
01.2.09.10.		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	1.199.970,00	12	321.799.649,00	2 unit	319.370.000,00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	3 unit	316.755.562,00	3,00	316.755.562,00	15,00	638.555.211,00	32,96	53,21									
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											15,47	14,01	38,71	22,01	54,41	18,32	97,54	37,92	13,50	92,26			32,96	57,64								
<b>Predikat kinerja Program</b>											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2,		<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>			1.438.875,00	-	122.851.350,00		223.799.800,00		-		40.401.125,00		77.178.960,00		103.255.500,00	-	220.835.585,00	-	343.686.935,00		23,89	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
02.2.01.01.		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	6 Dokumen	1.438.875,00	1	122.851.350,00	1 Dokumen	223.799.800,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	40.401.125,00	0 Dokumen	77.178.960,00	1 dokumen	103.255.500,00	1,00	220.835.585,00	2,00	343.686.935,00	33,33	23,89									
<b>Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)</b>											0,00	0,00	16,93	18,05	30,11	34,49	100,00	46,14		98,68			33,33	23,89								
<b>Predikat kinerja Program</b>											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3,		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>			7.276.645,10	-	2.896.195.799,00		1.512.662.900,00				174.079.200,00		170.951.000,00		73.003.900,00		1.002.856.224,00	-	1.420.890.324,00		59,33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi								
03.2.01.01.		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1500 Orang	6.477.836,02	304	2.787.615.299,00	60 Orang	1.029.919.300,00	0 Orang	101.176.100,00	0 Orang	125.566.600,00	0 Orang	-	80 orang	776.789.034,00	80,00	1.003.531.734,00	384,00	3.791.147.033,00	25,60	58,52									

KODE	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKP Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023	Unit SKPD						
								I		II		III		IV						13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp
03.2.01.02.		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		-	-	4 Lembaga	106.548.900,00	0 Lembaga	15.526.700,00	1 Lembaga	5.640.000,00	0 Lembaga	-	3 lembaga	81.557.990,00	4,00	102.724.690,00		102.724.690,00	12,80	-			
03.2.01.03.		Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		-	-	33 unit	171.918.700,00	0 Unit	28.687.500,00	0 Unit	6.062.400,00	0 Unit	-	10 unit	82.950.000,00	10,00	117.699.900,00		117.699.900,00	8,53	-			
03.2.02.01.		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	102 LPK	798.809.082,00	14	108.580.500,00	7 Lembaga	105.885.300,00	0 Lembaga	17.867.000,00	0 Lembaga	12.262.400,00	7 Lembaga	56.237.900,00	2 lembaga	15.866.000,00	9,00	102.233.300,00	23,00	210.813.800,00	12,04	26,39		
03.2.04.01.		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		-	-	4 Perusahaan	98.390.700,00	0 Perusahaan	10.821.900,00	0 Perusahaan	21.419.600,00	0 Perusahaan	16.766.000,00	4 perusahaan	45.693.200,00	4,00	94.700.700,00		94.700.700,00	9,63	-			
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)									14,96	13,79	58,05	10,87	30,09	14,03	97,56	52,33	75,19	91,02			9,63	16,98			
Predikat kinerja Program									Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah			
4,		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			1.480.725.084,00	-	356.179.274,00		283.126.100,00		9.428.400,00		27.661.400,00		84.515.600,00		158.135.900,00	-	279.741.300,00	-	635.920.574,00		42,95	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
04.2.03.02.		Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	6 Dokumen	780.833.384,00	5000	257.939.274,00	5000 Orang	104.722.200,00	268 Orang	6.501.900,00	633 Orang	21.599.000,00	282 Orang	23.702.600,00	250 orang	52.040.900,00	1,433,00	103.844.400,00	6,433,00	361.783.674,00	100,00	46,33		
04.2.03.03.		Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	240 Peserta	699.891.700,00	40	98.240.000,00	100 Orang	178.403.900,00	0 Orang	2.926.500,00	0 Orang	6.062.400,00	0 Orang	60.813.000,00	100 orang	106.095.000,00	100,00	175.896.900,00	140,00	274.136.900,00	79,17	39,17		

KODE	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Unit SKPD
					6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											9,00	3,92	24,74	12,01	51,27	28,36	97,68	54,58		98,88			79,17	42,75	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah		Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah	
5,		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			2.278.984.166,00	-	1.868.643.340,00		6.733.591.300,00		1.342.055.100,00		1.514.446.100,00		1.467.099.800,00		1.462.162.500,00	-	5.785.763.500,00	-	7.654.406.840,00		100,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
05.2.01.01.		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		165 Dokumen; 72 Bulan	449.988,00	12	88.897.600,00	237 Perusahaan	84.160.200,00	0 Perusahaan	11.612.400,00	0 Perusahaan	22.935.600,00	0 Perusahaan	20.232.400,00	21 perusahaan	28.239.800,00	21,00	83.020.200,00	33,00	171.917.800,00	20,00	38,20	
05.2.01.02.		Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		220 Dokumen; 72 Bulan	409.990,00	20	91.104.800,00	237 Perusahaan	67.720.200,00	0 Perusahaan	11.238.600,00	0 Perusahaan	15.000.000,00	0 Perusahaan	16.595.600,00	1 perusahaan	24.886.000,00	1,00	67.720.200,00	21,00	158.825.000,00	14,77	38,74	
05.2.01.03.		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		6 Dokumen	435.000,00	1	1.117.452.300,00	1 Laporan	5.975.307.000,00	0 Laporan	1.221.605.500,00	0 Laporan	1.273.992.100,00	0 Laporan	1.268.644.200,00	1 Laporan	1.293.116.600,00	1,00	5.057.358.400,00	2,00	6.174.810.700,00	20,96	100,00	
05.2.02.01.		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		-	-	-	14 Perkar	188.793.600,00	3 Perkar	24.889.300,00	8 Perkar	58.538.100,00	6 Perkar	61.171.500,00	7 perkar	17.484.300,00	24,00	162.083.200,00		162.083.200,00	15,72	-		

Print By eMONEV - KABUPATEN BENGKALIS

KODE	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Unit SKPD
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 7 +13		15 = 14/6 x 100%		(16)
05.2.02.02.		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		195Kasus	676.064.96,00	23	301.924.140,00	16Perkara	139.667.700,00	3Perkara	44.021.900,00	7Perkara	37.482.600,00	6Perkara	24.424.800,00	8perkara	32.550.800,00	24,00	138.480.100,00	47,00	440.404.240,00	17,40	65,14	
05.2.02.03.		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		-	-	-	50 Asosiasi dan Serikat Pekerja	80.703.600,00	0 Asosiasi serikat pekerja	17.655.200,00	1 Asosiasi serikat pekerja	29.806.800,00	0 Asosiasi serikat pekerja	10.237.000,00	19 Asosiasi Serikat Pekerja	22.426.600,00	20,00	80.125.600,00		80.125.600,00	14,50	-		
05.2.02.04.		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		30 Pertemuan	307.941.470,00	4	269.264.500,00	2 Lembaga	197.239.000,00	0 Lembaga	11.032.200,00	0 Lembaga	76.690.900,00	0 Lembaga	65.794.300,00	1 lembaga	43.458.400,00	1,00	196.975.800,00	5,00	466.240.300,00	14,81	100,00	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											21,06	17,57	40,80	29,20	73,14	23,67	97,52	24,90		95,35			14,81	244,71	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi	
2.		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			599.025.949,00	-	197.308.286,00		134.597.300,00		19.165.200,00		14.771.200,00		34.593.385,00		74.926.374,00	-	143.456.159,00	-	340.764.445,00		56,89	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
02.2.01.04.		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		6 Dokumen	599.025.949,00	1	197.308.286,00	1 Dokumen	134.597.300,00	0 Dokumen	19.165.200,00	0 Dokumen	14.771.200,00	0 Dokumen	34.593.385,00	1 dokumen	74.926.374,00	1,00	143.456.159,00	2,00	340.764.445,00	33,33	56,89	
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											29,63	14,24	43,48	10,97	50,00	25,70	100,00	55,67		106,58			33,33	56,89	
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah		Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah	

KODE	Sasaran RKPD	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target RENSTRA Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (akhir periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2023		Unit SKPD		
					6		7		8		9		10		11		12			13		14 = 7 +13			15 = 14/6 x 100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		K	Rp
3,		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				360.000.000,00	-	77.840.80		172.248.200,00		14.403.600,00		117.565.000,00		6.840.000,00		-	-	138.808.600,00	-	216.649.400,00		60,18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
03.2.01.06.		Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan		120 Orang	360.000.000,00	16	77.840.80	16 Orang	172.248.200,00	0 Orang	14.403.600,00	16 Orang	117.565.000,00	0 Orang	6.840.000,00	0	-	16,00	138.808.600,00	32,00	216.649.400,00	26,67	60,18		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja per Program (%)											8.36	8.36	71.12	68.25	98.00	3.97	0.00	0.00	98.00	80,59			26.67	60.18		
Predikat kinerja Program											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sedang	Sedang	Sangat Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD (%)											14.07	10.27	41.98	24.48	55.29	21.22	84.33	38.79	98.00	94.76			91.65	51.19		
Predikat Kinerja OPD D											Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																										
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																										
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*) :																										

\*) Diisi oleh Kepala Bappeda



Disusun,  
Bengkalis, - Januari - 2024  
Pft. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu

**SALMAN ALFARISI, ST**  
Pembina  
NIP. 19820519 201102 1 001

Dievaluasi,  
Bengkalis, - Januari - 2024  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



**RINTO, SE. M.Si.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19810601 200903 1 002

## 2.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran. Pelaksanaan kinerja dan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat dilihat dari indikator yang terukur. Indikator tersebut harus dapat menjadi indikator utama dalam pengukuran suatu organisasi dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan pengelolaan pencapaian (*managing of result*) sendiri meliputi perencanaan strategis, perencanaan program, menetapkan prioritas dan alokasi sumber daya, perencanaan dan pengorganisasian kegiatan, manajemen operasi, pemantauan kegiatan dan pengukuran pencapaian, serta analisis pencapaian, pelaporan pencapaian dan adanya umpan balik mengenai capaian.

Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengelolaan pencapaian (*managing of result*) tidak terlepas dari adanya Pohon Kinerja yang telah disusun oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Pohon kinerja merupakan penyelarasan sasaran strategis instansi ke unit kerja dibawahnya yang merupakan alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Dalam rangka memperbaiki proses penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap individu dan dengan desain strategi/program/kegiatan, maka perlu didasarkan pada proses membangun model logis (*logic model*) maupun kerangka berpikir logis (*logical framework*) yang tepat. Pedoman tersebut akan mengarahkan instansi pemerintah untuk membangun model berpikir logis yang benar

dalam rangka mendapatkan kinerja organisasi yang dijabarkan secara baik kepada kinerja individu, serta desain strategi/program/kegiatan yang tepat sasaran. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja melalui penjenjangan kinerja sebagai proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah, perlu menilai kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja organisasi secara berjenjang.

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis memiliki tujuan meningkatkan kontribusi non migas terhadap perekonomian daerah dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada pohon kinerja pada gambar 2.1.



Gambar 2.1. Pohon Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu

Evaluasi pencapaian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 diakomodir ke dalam 2 (dua) sasaran strategis:

### **1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja**

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan nilai yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2023 tercatat jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Bengkalis sebanyak 244.037 (dua ratus empat puluh empat ribu tiga puluh tujuh) orang dan jumlah angkatan kerja yang ada sebanyak 262.657 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) orang. Dari target yang ditetapkan sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) terhitung realisasinya sebesar 92,91% (sembilan puluh dua koma sembilan puluh satu persen). Terjadi peningkatan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dibandingkan pada tahun 2022 yang berada pada posisi 92,82% (sembilan puluh dua koma delapan puluh dua persen)(Sumber: BPS, Agustus 2023).

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan terkait persentase tingkat kesempatan kerja adalah usia tenaga kerja, tingkat pendidikan-pengetahuan-ketrampilan dan keahlian, lapangan pekerjaan yang tersedia, permintaan dan kebutuhan tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tersedia, besarnya permintaan produk dari masyarakat (*economic demand*), besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, kegiatan ekspor impor, kebijakan pajak yang dijalankan pemerintah serta kerjasama dengan Negara lain dalam hal menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Kecilnya nilai peningkatan kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Bengkalis diindikasikan terjadi karena terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja. Sebagaimana data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis yang mencantumkan jumlah angkatan kerja tahun 2023 sebesar 262.657 (dua

ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) orang sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 253.988 (dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) orang atau peningkatannya setara dengan 3,30% (tiga koma tiga puluh persen). Dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja yang ada maka peningkatan kesempatan kerja menjadi hal yang sangat lumrah terjadi. Oleh karena itu diperlukan inovasi-inovasi dan langkah-langkah konkrit agar peluang kesempatan kerja semakin luas bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis. Diantaranya dengan melakukan inovasi sistem penyebarluasan informasi peluang kerja, menambah jumlah kegiatan bursa kerja baik bursa kerja umum maupun bursa kerja khusus yang dapat bekerja sama dengan pihak-pihak swasta maupun sekolah kejuruan yang ada di Kabupaten Bengkalis dan mendorong pihak swasta untuk memperluas peluang kesempatan kerja.

Tabel 2.10. Realisasi Perjanjian Kinerja  
Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96	92,91

Tabel 2.11. Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja  
Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja  
Tahun 2022-2023

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET		REALISASI	
				2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	95	96	92,82	92,91

Untuk wilayah Provinsi Riau, tingkat kesempatan kerja berada pada angka 95,77% (sembilan puluh lima koma tujuh puluh tujuh persen) dengan jumlah penduduk umur 15 (lima belas) tahun yang bekerja

sebanyak 3.002.334 (tiga juta dua ribu tiga ratus tiga puluh empat) orang dan jumlah angkatan kerja sebanyak 3.134.788 (tiga juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) orang. Meskipun tingkat kesempatan kerja berada pada angka 95,77% (sembilan puluh lima koma tujuh puluh tujuh persen) namun masih terdapat 135.050 (seratus tiga puluh lima ribu lima puluh) orang yang tercatat sebagai pengangguran di Provinsi Riau. Salah satu penyebab adanya angka pengangguran tersebut adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Provinsi Riau, sistem pendidikan yang belum *link and match* atau masih *output oriented* dan belum *job oriented*. Seperti halnya di Kabupaten Bengkalis, di wilayah Provinsi Riau besaran tingkat kesempatan kerja dipengaruhi oleh adanya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 0,59% (nol koma lima puluh sembilan persen) di tahun 2023 yang berada di angka 64,45% (enam puluh empat koma empat puluh lima persen) dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada di angka 63,86% (enam puluh tiga koma delapan puluh enam persen).

Tabel 2.12. Perbandingan Tingkat Kesempatan Kerja Provinsi Riau dengan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Provinsi Riau</b>	<b>Kabupaten Bengkalis</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	95,77	92,91

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesempatan kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis didukung oleh 2 (dua) kebijakan strategis terkait ketenagakerjaan yakni diturunkannya tingkat pengangguran terbuka dan ditingkatkannya penempatan tenaga kerja.



Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Logis Pencapaian Tujuan Jangka Menengah Tahun 2023 Sasaran Strategis Meningkatnya Kesempatan Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik pengangguran terbuka adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha atau belum mulai bekerja meskipun sudah memiliki pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Faktor-faktor penyebab adanya pengangguran terbuka antara lain adalah jumlah penduduk yang tinggi dan peningkatan jumlah angkatan kerja, perubahan struktur ekonomi yang mengikuti perkembangan jaman dengan lebih mengandalkan peralatan canggih sehingga kebutuhan sumber daya manusia sebagai pekerja menurun, rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan yang menjadikan calon pekerja sulit memperoleh pekerjaan serta penurunan tingkat perekonomian yang pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat atas sebuah produk sehingga mengurangi jumlah produksi. Selain daripada itu faktor kemalasan dan takut mengambil resiko dalam sebuah jenis pekerjaan juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam menganalisa tingkat pengangguran terbuka yang ada pada sebuah daerah.

Tahun 2023 tercatat jumlah masyarakat yang menganggur di Kabupaten Bengkalis adalah sebanyak 18.620 (delapan belas ribu enam ratus dua puluh) orang dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 262.657 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) orang sehingga menghasilkan besaran tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,09% (tujuh koma nol sembilan persen) dari target sebesar 8,44% (delapan koma empat puluh empat persen) yang diperoleh dari

perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang ada.

Strategi penurunan pengangguran terbuka dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka didukung oleh pelaksanaan 3 (tiga) program strategis yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja Produktivitas Tenaga Kerja yang keduanya merupakan program unggulan yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis serta Program Hubungan Industrial. Program Perencanaan Tenaga Kerja merupakan program yang dapat dijadikan sarana oleh pemerintah daerah dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja sehingga tercipta kesempatan kerja yang luas, tenaga kerja yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera sebagaimana diamanatkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman perencanaan tenaga kerja.

Strategi penurunan pengangguran terbuka lainnya adalah dilaksanakannya beberapa jenis pelatihan berbasis kompetensi yang dapat diperoleh oleh para calon tenaga kerja dengan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis sebagai penyelenggara. Pelatihan berbasis kompetensi diarahkan untuk dapat meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja baik *hard skill* maupun *soft skill* untuk dapat memenuhi kebutuhan peluang pekerjaan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dari sektor hubungan industrial dilakukan langkah-langkah pencegahan maupun penyelesaian kasus hubungan industrial sehingga diharapkan dengan penurunan jumlah kasus yang dicegah dan peningkatan penyelesaian kasus yang terjadi antara pekerja

dengan pengusaha dapat menekan angka pemutusan hubungan kerja dan mengurangi angka pengangguran yang ada.

<p>Menurunnya Pengangguran Terbuka</p> <p>Indikator Kinerja : Tingkat Pengangguran Terbuka</p> <p>Target : 8,44%</p> <p>Realisasi : 7,09%</p>		Program Perencanaan Tenaga Kerja => Program Unggulan => Mengakomodir ketersediaan data tingkat kesempatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, perusahaan, lembaga pelatihan dan ketenagakerjaan tingkat Kabupaten
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja => Program Unggulan => Mengakomodir kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil dan Pengukuran Produktivitas Tingkat
		Program Hubungan Industrial => Mengakomodir kegiatan terkait Pengesahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Konflik Hubungan Kerja dan Jaminan Sosial

Gambar 2.3. Dukungan Program Bagi Strategi Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Kebijakan strategis yang kedua adalah ditingkatkannya penempatan tenaga kerja. Setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan atas dasar asas terbuka, bebas obyektif, adil dan setara tanpa diskriminasi. Penempatan tenaga kerja diarahkan pada jabatan atau posisi yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. Penempatan tenaga kerja sendiri adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam mengisi lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Mekanisme pelayanan penempatan tenaga kerja dimulai dari pelayanan kepada pencari kerja secara manual maupun *online*

system. Menurut Kuncoro dalam Konadi, 2014, penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja.

<p>Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>Indikator Kinerja : Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Target : 96% Realisasi : 92,91%</p>		Program Penempatan Tenaga Kerja => Mengakomodir kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten; Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
		Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi => Program Unggulan => Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan status lahan transmigran dan keberlanjutannya nasib para transmigran di Kabupaten Bengkalis
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi => Mengakomodir kegiatan pembangunan dan pengembangan perekonomian masyarakat transmigrasi dengan cara memberikan ketrampilan tambahan dalam mengolah hasil ikan

Gambar 2.4. Dukungan Program Bagi Strategi Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilihat dari komitmen dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan yang dimulai dengan disusunnya rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reuiu serta

evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan harapan proses-preses yang dilaksanakan menjadi perwujudan dari akuntabilitas kinerja yang memiliki prinsip bahwa kinerja yang ditargetkan berorientasi pada pada hasil (*outcomes*), adanya keselarasan atau memiliki keterkaitan sebab akibat (*causality*) dan sinergitas (*alignment*), kinerja yang terukur dan relevan serta target kinerja yang terukur dan logis.

Sasaran strategis jangka menengah kedua Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah (target BB) yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.907.876.565,- (sebelas milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Anggaran tersebut dialokasikan bagi belanja pegawai sebesar Rp. 7.184.827.355,- (tujuh milyar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan Rp. 4.723.049.210,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta empat puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) belanja rutin. Penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sedang dalam proses pada saat laporan ini disusun. Namun dalam rangka memenuhi target capaian telah disiapkan data-data pendukung antara lain dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah, Rencana Aksi Kegiatan, Perjanjian Kinerja, Kerangka Acuan Kerja dan laporan kegiatan pada masing-masing pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2023 dan data-data dukung lainnya yang diperlukan.

Minimnya ketrampilan dan kompetensi sumber daya Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan program kegiatan yang menjadi tugas pelaksanaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Namun demikian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis terus mengoptimalkan

kemampuan sumber daya yang ada demi tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan. Disamping juga meningkatkan kemampuan operasional dan teknis yang terus dikembangkan melalui jalur pendidikan dan pelatihan melalui berbagai media guna lebih meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

Dari aspek anggaran, tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 18.003.807.327,- (delapan belas milyar tiga juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) untuk APBD Murni dan Rp. 20.055.172.165,- (dua puluh milyar lima puluh lima juta seratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima rupiah) untuk APBD Perubahan bagi pelaksanaan 7 (tujuh) program 17 (tujuh belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

Sasaran strategis meningkatnya kesempatan kerja memperoleh total dukungan pendanaan sebesar Rp. 8.147.295.600 - (delapan milyar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 7.989.495.468,- (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) atau setara dengan 98,06% (sembilan puluh delapan koma nol enam persen). Sedangkan sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah mendapatkan dukungan pendanaan sebesar Rp. 11.907.876.565,- (sebelas milyar sembilan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan serapan anggaran sebesar Rp. 11.465.844.643,- (sebelas milyar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) atau setara dengan 96,29% (sembilan puluh enam koma dua puluh sembilan persen). Secara umum anggaran yang telah disediakan telah dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dukungan pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka

pencapaian sasaran strategis target jangka menengah tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis. Diharapkan ke depan efektifitas anggaran akan lebih dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis dalam rangka memperoleh kesempatan peluang kerja yang seluas-luasnya dengan jenis kesempatan kerja yang lebih beragam. Secara lebih jelas efisiensi penggunaan anggaran dan perbandingan capaian kinerja dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13. Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja (%)			Anggaran			Efisiensi
		Target	Hasil	Capaian	Pagu	Serapan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Meningkatnya Kesempatan Kerja</b>	<b>Tingkat Kesempatan Kerja</b>	<b>96</b>	<b>92,91</b>	<b>96,78</b>	<b>8.147.295.600</b>	<b>7.989.495.468</b>	<b>98,06</b>	<b>1,94</b>
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	87	70	80,46	223.799.800	220.835.585	98,68	1,32
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	20	15	75,00	1.512.662.900	1.420.890.324	93,93	6,07
	Program Penempatan Tenaga Kerja	83	65	78,31	283.126.100	279.741.300	98,80	1,20
	Program Hubungan Industrial	93	80	86,02	5.824.991.300	5.785.763.500	99,33	0,67
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	100	75,50	75,50	163.627.300	143.456.159	87,67	12,33
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	100	100	100,00	139.088.200	138.808.600	99,80	0,20
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Predikat Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>BB</b>			<b>11.907.876.565</b>	<b>11.465.844.643</b>	<b>96,29</b>	<b>3,71</b>
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100,00	11.907.876.565	11.465.844.643	96,29	3,71

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Perkembangan dunia industri secara global ditandai dengan pesatnya pembangunan di segala bidang saat ini sangat terpengaruh oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dibarengi dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang signifikan mengakibatkan permasalahan di bidang peluang dan kesempatan kerja, rendahnya ketrampilan calon tenaga, permasalahan hubungan industrial, kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja serta rendahnya pendapatan masyarakat transmigran masih menjadi isu-isu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bengkalis saat ini.

Seiring perkembangan ekonomi global dan industrialisasi di setiap sektor, perusahaan yang beraktifitas di Kabupaten Bengkalis pun semakin berkembang, tidak hanya bergerak di sektor minyak dan gas namun juga bergerak di sektor perkebunan, pengolahan minyak kelapa sawit dan manufaktur. Keadaan tersebut tidak bisa lepas dari permasalahan hubungan industrial antara pihak pengusaha dan para pekerjanya serta peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang dinilai masih lemah. Disamping juga faktor kelembagaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi baik dari jumlah Aparatur Sipil Negara yang bertugas maupun kompetensi dan keahliannya. Upaya memperkuat lembaga ketenagakerjaan guna menyelesaikan permasalahan hubungan industrial, sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja terhadap masalah kontrak kerja juga perlu ditingkatkan lagi.

Berdasarkan hasil analisa terhadap kondisi saat ini, permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 adalah:

#### 1. Angka pengangguran

Jumlah penduduk Bengkalis tahun 2023 yakni 658.846 (enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh enam) orang yang meningkat sebanyak 75.873 (tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh

puluh tiga) orang atau setara dengan 11,52% (sebelas koma lima puluh dua persen) dibandingkan tahun 2022 yakni 582.973 (lima ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) orang tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah lapangan pekerjaan, sehingga jumlah pengangguran meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Tahun 2023 pengangguran terbuka Kabupaten Bengkalis berjumlah 18.620 (delapan belas ribu enam ratus dua puluh) orang meningkat sebanyak 393.000 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu) orang dibandingkan tahun 2022 sebanyak 18.227 (delapan belas juta dua ratus dua puluh tujuh) orang (Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2023). Meskipun capaian kinerja Tingkat Kesempatan Kerja menunjukkan sinyal yang positif yakni sebesar 92,91% (sembilan puluh dua koma sembilan puluh satu) meningkat 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dibandingkan tahun 2022 yang berada di angka 98,28% (sembilan puluh delapan koma dua puluh delapan persen) namun hal tersebut diindikasikan terjadi karena terdapat peningkatan jumlah angkatan kerja. Sebagaimana data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis yang mencantumkan jumlah angkatan kerja tahun 2023 sebesar 262.657 (dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh) orang sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 253.988 (dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) orang atau peningkatannya setara dengan 3,30% (tiga koma tiga puluh persen). Dengan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja yang ada maka peningkatan kesempatan kerja menjadi hal yang sangat lumrah terjadi pada masyarakat;

## 2. Rendahnya keterampilan calon tenaga kerja

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bengkalis dalam hal ini adalah kompetensi dan ketrampilan kerja, sistem pendidikan yang belum *link and match* atau masih *output oriented* dan belum *job oriented* masih menjadi isu penting yang harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam

- rangka meningkatkan penerimaan tenaga kerja lokal pada peluang kesempatan kerja yang ada;
3. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi lapangan pekerjaan sebagai akibat dari ketersediaan informasi pasar kerja yang belum optimal;
  4. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang diakibatkan dari lemahnya kedudukan dan pendidikan serta tuntutan ekonomi dari pekerja;
  5. Pemberdayaan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang belum optimal dengan indikator yang perlu ditingkatkan antara lain pelayanan bank, promosi dan melibatkan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengembangan pola usaha pokok dan komoditas unggul.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025**

Telaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang tercantum pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis 2025 dan selanjutnya menyesuaikan dengan regulasi terbaru terhadap program dan kegiatan untuk tahun 2025;
- b. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan tersebut dengan analisis tahapan-tahapan terdahulu;
- c. Penyajian data dalam bentuk matrik dengan menempatkan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisa;
- d. Memastikan bahwa program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang merupakan program lanjutan

atau prioritas berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan sudah termuat didalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 tetap dilaksanakan;

- e. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan hasil analisa kebutuhan;
- f. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.

Secara lebih jelas review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.14.

Tabel 2.14. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu 2025

Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan												
<b>Urusan Ketenagakerjaan</b>						<b>32.839.007.389,80</b>						
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik												
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						Predikat SAKIP Perangkat Daerah		BB				
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						Predikat SAKIP Perangkat Daerah		BB				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Bengkulu	100%	19.861.712.059,80	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Bengkulu	100%		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Bengkulu	100%	394.630.744,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Kab. Bengkulu	100%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	3 Dokumen	242.006.364,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	3 Dokumen		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bengkulu	4 Laporan	152.624.380,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bengkulu	4 Laporan		

Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan	Persentase admnistrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Kab. Bengkalis	100%	12.706.475.820,00	Kegiatan Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan	Persentase admnistrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Kab. Bengkalis	100%		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkalis	80 orang/bln	12.545.351.102,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkalis	80 orang/bln		
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bengkalis	2 Dokumen	161.124.718,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bengkalis	2 Dokumen		
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	100%	672.000.000,00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	100%		
Pengamanan Barang Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bengkalis	2 Dokumen	672.000.000,00	Pengamanan Barang Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bengkalis	2 Dokumen		
Kegiatan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN Yang Mendapat Pelayanan Administrasi	Kab. Bengkalis	100%	227.888.000,00	Kegiatan Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN Yang Mendapat Pelayanan Administrasi	Kab. Bengkalis	100%		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bengkalis	140 Paket	52.168.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bengkalis	140 Paket		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab.Bengka lis, Provinsi Riau, Indonesia	20 Orang	175.720.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab.Beng kalis, Provinsi Riau, Indonesia	20 Orang		

Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	100%	1.953.191.330,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	100%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	2 Paket	45.035.875,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	2 Paket		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kec. Bathin Solapan	2 Paket	146.604.687,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	Kec. Bathin Solapan	2 Paket		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	2 Paket	295.800.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	2 Paket		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	2 Paket	121.667.053,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	2 Paket		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	1 Dokumen	17.024.600,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	1 Dokumen		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bathin Solapan	600 Laporan	1.021.959.115,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bathin Solapan	600 Laporan		
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Bathin Solapan	1 Dokumen	305.100.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Bathin Solapan	1 Dokumen		

Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Yang Tersedia	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bengkulu	100%	1.657.313.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Yang Tersedia	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bengkulu	100%		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Kab. Bengkulu	1 Unit	35.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Kab. Bengkulu	1 Unit		
Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bengkulu	5 Paket	689.487.000,00	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bengkulu	5 Paket		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bengkulu, Provinsi Riau	87 Unit	932.826.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Bengkulu, Provinsi Riau	87 Unit		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Kab. Bengkulu	100%	602.670.165,80	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Kab. Bengkulu	100%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkulu	800 Laporan	237.899.650,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkulu	800 Laporan		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bengkulu	12 Laporan	335.539.475,80	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bengkulu	12 Laporan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkulu	1 Laporan	29.231.040,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkulu	1 Laporan		

Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bengkalis	100%	1.647.543.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bengkalis	100%		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bengkalis	14 Unit	319.030.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bengkalis	14 Unit		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bengkalis	40 Unit	119.300.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bengkalis	40 Unit		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkalis	6 Unit	624.233.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkalis	6 Unit		
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkalis	7 Unit	584.980.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkalis	7 Unit		
Meningkatkan Kontribusi Non Migas Terhadap Perekonomian Daerah												
Meningkatnya Kesempatan Kerja		Tingkat Kesempatan Kerja		96%		Meningkatnya Kesempatan Kerja		Tingkat Kesempatan Kerja		96%		

Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Program Perencanaan Tenaga Kerja *** Program Unggulan	Meningkatnya Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase Data Rencana Tenaga Kerja Daerah		92%	343.233.420,00	Program Perencanaan Tenaga Kerja *** Program Unggulan	Meningkatnya Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase Data Rencana Tenaga Kerja Daerah		92%		
Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Kab. Bengkalis	92%	343.233.420,00	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Kab. Bengkalis	92%		
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bengkalis	1 Dokumen	200.631.463,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bengkalis	1 Dokumen		
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Kab. Bengkalis	20 Orang	142.601.957,00	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Kab. Bengkalis	20 Orang		
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja *** Program Unggulan	Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditingkatkan Daya Saing dan Produktivitasnya		30%	4.681.105.201,00	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja *** Program Unggulan	Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditingkatkan Daya Saing dan Produktivitasnya		30%		
Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Kab. Bengkalis	30%	4.297.225.852,00	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Kab. Bengkalis	30%		
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	Kab. Bengkalis	270 Orang	3.996.642.339,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	Kab. Bengkalis	270 Orang		

Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun N	Kab. Bengkulu	5 Lembaga	133.184.578,00	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun N	Kab. Bengkulu	5 Lembaga		
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Bengkulu	6 Unit	167.398.935,00	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Bengkulu	6 Unit		
Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS Yang Dibina		30%	240.742.882,00	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS Yang Dibina		30%		
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Bengkulu	15 Lembaga	240.742.882,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Bengkulu	15 Lembaga		
Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditingkatkan Produktivitasnya		20%	143.136.467,00	Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditingkatkan Produktivitasnya		20%		
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kab. Bengkulu	4 Perusahaan	143.136.467,00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kab. Bengkulu	4 Perusahaan		
Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan		87%	750.000.000,00	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan		87%		

Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja	Persentase Pelayanan Antar Kerja		20%	550.000.000,00	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja	Persentase Pelayanan Antar Kerja		20%		
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Bengkalis	5000 Orang	200.000.000,00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Bengkalis	5000 Orang		
Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa kerja	Kab. Bengkalis	250 Orang	350.000.000,00	Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Bengkalis	250 Orang		
Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran	Persentase Pekerja Migran Yang Terlindungi		20%	200.000.000,00	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran	Persentase Pekerja Migran Yang Terlindungi		20%		
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang Terlayani sesuai Prosedur dalam Layanan Terpadu Satu Atap dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang Ditangani		30 Orang	200.000.000,00	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang Terlayani sesuai Prosedur dalam Layanan Terpadu Satu Atap dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang Ditangani		30 Orang		
Program Hubungan Industrial	Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial		97%	7.202.956.709,00	Program Hubungan Industrial	Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial		97%		
Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama		20%	624.623.753,00	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama		20%		

Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Bengkulu	25 Perusahaan	115.529.286,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Bengkulu	25 Perusahaan		
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Bengkulu	7 Perusahaan	110.369.260,00	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Bengkulu	7 Perusahaan		
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Bengkulu	1 Laporan	398.725.207,00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Bengkulu	1 Laporan		
Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		100%	6.578.332.956,00	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		100%		

Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Bengkalis	35 Perkara	166.607.574,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Bengkalis	35 Perkara		
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab. Bengkalis	27 Perkara	241.297.297,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab. Bengkalis	27 Perkara		
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konferderasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terseleenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konferdasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Bengkalis	23 Asosiasi	95.993.294,00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konferderasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terseleenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konferdasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Bengkalis	23 Asosiasi		
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Bengkalis	1 Lembaga	221.580.333,00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Bengkalis	1 Lembaga		

Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bengkulu	34.000 Orang	5.852.854.458,00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bengkulu	34.000 Orang		
<b>Urusan Ketransmigrasian</b>					<b>752.159.968,00</b>							
Meningkatkan Kontribusi Non Migas							Meningkatkan Kontribusi Non Migas					
Meningkatnya Kesempatan Kerja		Tingkat Kesempatan Kerja		96%		Meningkatnya Kesempatan Kerja		Tingkat Kesempatan Kerja		96%		
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi *** Program Unggulan	Meningkatnya Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi		100%	300.000.000,00	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi *** Program Unggulan	Meningkatnya Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi		100%		
Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terselenggaranya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		100%	300.000.000,00	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terselenggaranya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi		100%		
Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kec. Rupal	1 Dokumen	300.000.000,00	Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kec. Rupal	1 Dokumen		
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi		100%	452.159.968,00	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi		100%		

Rancangan Analisa Kebutuhan						Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah						Catatan Penting
Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran/ Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)					Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		100%	452.159.968,00	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		100%		
Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kec. Rupal	20 Orang	162.414.568,00	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kec. Rupal	20 Orang		
Monitoring dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Kec. Rupal	1 Lokasi	289.745.400,00	Monitoring dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Kec. Rupal	1 Lokasi		
<b>TOTAL</b>					<b>33.591.167.357,80</b>	<b>TOTAL</b>						

## 2.5. Penelahaan Terhadap Usulan Permasalahan Masyarakat

Beberapa kegiatan diusulkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan ketrampilan masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja yang ada di Kabupaten Bengkalis selain juga untuk meningkatkan ketrampilan di sektor industri kecil skala rumah tangga.

Tabel 2.15. Usulan Jenis Pelatihan, Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 Berdasarkan Skala Prioritas

No	Usulan Jenis Pelatihan	Lokasi	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	2	3	4
<b>USULAN MASYARAKAT MELALUI MUSRENMBANG</b>			
1	Pelatihan Kesehatan dan Keseleamatan Kerja (K3)	Kecamatan Bathin Solapan, Kecamatan Mandau	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga / Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi/ Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2	Pelatihan <i>welder</i> (pengelasan)		
3	Peningkatan ketrampilan bagi masyarakat di bidang komputer agar dapat bersaing di dunia kerja dan industri		

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Gambaran umum atas kondisi ketenagakerjaan Indonesia saat ini terlihat dari perkembangan peningkatan jumlah penduduk Indonesia usia produktif yang merupakan tantangan strategis bangsa. Jumlah angkatan kerja mencapai 147,71 juta orang pada Agustus 2023 naik sebanyak 3,99 juta orang jika dibandingkan Agustus 2022 sebesar 143,72 juta orang, dimana ini merupakan potensi yang dapat mengoptimalkan kinerja perekonomian Indonesia. Namun besarnya jumlah angkatan kerja ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja yang layak dan tantangan dalam menjawab perubahan struktur serta perilaku tenaga kerja merupakan hal yang cukup penting.

Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketenagakerjaan menjadi isu utama di era automasi dan ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang dengan cepat. Gambaran peluang yang ada dengan memandang kondisi terkini ketenagakerjaan Indonesia di era automasi dan ekonomi digital saat ini:

##### *1. Booming* Ekonomi Digital dan Automasi

Internet saat ini telah menjadi kebutuhan penduduk Indonesia. Hasil Pendataan Survei Susenas pada 2022, jumlah penduduk yang mengakses internet dalam 3 (tiga) bulan terakhir sebesar 66,48% (enam puluh enam koma empat puluh delapan persen) dari populasi penduduk Indonesia. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya sebesar 47,22% (empat puluh tujuh koma dua puluh dua persen). Implikasinya transaksi bisnis melalui internet (ekonomi digital) semakin membesar. Era automasi yang diperkirakan akan melahirkan revolusi industri 4.0 ini berdiri di atas tren bergesernya perekonomian dari *resources-based* (berbasis sumber daya) menjadi *knowledge-based economy* (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan). Pergeseran terjadi

seiring dengan kesadaran bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan sementara itu disisi lain kekayaan intelektual jika dikelola dengan optimal akan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang tidak ada batasnya.

## 2. Perubahan Kebutuhan Keterampilan dan Model Pembelajaran (*Longlife Learning*)

Sebagai konsekuensi dari tren automasi dan tuntutan untuk berinovasi, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki spesialisasi dan keahlian yang mendalam. Di sisi lain, teknologi juga mendorong bertambahnya jenis dan jumlah pekerjaan yang sama kondisinya yaitu menuntut spesialisasi dan keahlian baru. Kebijakan ketenagakerjaan atau lebih luasnya kebijakan terkait dengan sumber daya manusia harus dapat menjawab tantangan tersebut. Institusi pendidikan juga harus mulai mengubah arah orientasi kurikulum yang mampu mengimbangi dinamika tersebut. Peningkatan keahlian digital mulai perlu diterapkan pada berbagai institusi pendidikan menengah.

## 3. Potensi Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang berpotensi dikembangkan secara lebih optimal di masa depan. Di Indonesia gaung ekonomi kreatif mencuat satu dasawarsa lalu (tepatnya pada 2007) seiring meningkatnya nilai ekspor dan kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Margin keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi kreatif relatif cukup tinggi dibandingkan sektor lain. Namun sebagai sebuah kegiatan ekonomi yang dicirikan dengan siklus hidup yang singkat, risiko usaha yang cukup tinggi, persaingan ketat, dan mudahnya pelaku pasar lain untuk melakukan imitasi produk menjadikan sektor ini juga sarat dengan tantangan.

## 4. Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan

Transformasi ekonomi dan pasar tenaga kerja yang tidak pasti membutuhkan penguatan perlindungan sosial. Ketentuan tradisional perlindungan sosial yang umumnya di kenal di negara berkembang

adalah berdasarkan pada pekerjaan berupah tetap. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperluas cakupan formal-informal dan memberikan prioritas kepada orang-orang termiskin yang tidak memiliki pekerjaan. Peraturan ketenagakerjaan harus ditinjau ulang untuk dapat melindungi tenaga kerja secara umum dan juga untuk memfasilitasi transisi kerja sebagai konsekuensi dari transformasi ekonomi yang sedang berlangsung.

Dari beberapa peluang yang mungkin dapat dikembangkan di Indonesia maka terdapat beberapa potensi permasalahan yang akan dihadapi, antara lain yakni:

#### 1. Kualitas Angkatan Kerja

Struktur atau kualitas tenaga kerja Indonesia saat ini masih jauh tertinggal dari negara lain di ASEAN dan juga OECD. Dari sebanyak 147,71 (seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh satu) juta orang angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2023, 36,82% (tiga puluh enam koma delapan puluh dua persen) nya menamatkan pendidikan tertinggi setingkat Sekolah Dasar. Sebesar 12,76% (dua belas koma tujuh puluh enam persen) angkatan kerja Indonesia yang merupakan lulusan universitas. Kualifikasi tenaga kerja secara agregat yang masih rendah tentu menjadi tantangan utama bagi Indonesia dalam mengejar produktivitas industri dan juga untuk menghadapi era automasi dan revolusi industri 4.0.

#### 2. Tantangan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Indonesia tengah menghadapi tantangan meningkatnya jumlah pengangguran terdidik. Pada tahun 2023 porsi pengangguran lulusan universitas terhadap total pengangguran terbuka hanya 5,18% (lima koma delapan belas persen). Lulusan SMK yang diharapkan dapat menjadi tenaga kerja siap pakai ternyata juga mengalami persoalan yang sama. Pada tahun 2022 9,42% (sembilan koma empat puluh dua persen) proporsi pengangguran terbuka berasal dari lulusan SMK.

Proporsi ini menurun menjadi 9,31% (sembilan koma tiga puluh satu persen) pada tahun 2023.

### 3. Pelindungan Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan dalam menyongsong era automasi yang mengarah ke revolusi industri 4.0 juga terjadi pada aspek hubungan industrial. Perkembangan komputer pada tahun 1970an, internet pada tahun 1990an, dan intensitas penggunaannya yang terus semakin tinggi hingga saat ini telah mengubah pola kerja dan cara berhubungan antara pekerja dengan industri yang berimplikasi pada hubungan industrial.

### 4. Tantangan Pengawasan Tenaga Kerja

Perkembangan model pekerjaan melalui perkembangan industri digital menghadirkan tantangan yang besar dalam pengawasan ketenagakerjaan. Per triwulan II tahun 2018 terdapat 192.238 (seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan) perusahaan yang menjadi objek pengawasan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen.Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan. Pada umumnya perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dengan model hubungan industrial yang jelas.

### 5. Rendahnya Jiwa Kewirausahaan

Banyak studi yang menunjukkan bahwa jiwa kewirausahaan pemuda Indonesia sangat rendah. Studi yang dilakukan oleh Rajagukguk (2000) menunjukkan bahwa dari total responden mahasiswa yang diwawancarai, hanya 15% (lima belas persen) diantaranya yang mempunyai keinginan untuk menjadi wirausahawan ketika menyelesaikan kuliahnya.

Pokok-pokok kegiatan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sedangkan pelaksanaannya mengacu pada beberapa

mandate peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta ketentuan pelaksanaannya.

Lokus dari pembangunan transmigrasi, desa dan kabupaten daerah tertinggal semuanya adalah perdesaan. Perdesaan selama ini seolah dianaktirikan dibandingkan dengan perkotaan karena perkotaan dianggap sebagai sumber pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga timbul bias perkotaan (urban bias).

Berbagai masalah berkenaan dengan upaya percepatan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi masih menyisakan berbagai isu strategis yang harus dihadapi lima tahun kedepan. Salah satu isu yang harus menjadi landasan pijak bagi Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi untuk dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan kesenjangan pembangunan nasional adalah isu ketimpangan antar wilayah yang masih cukup tinggi. Hal tersebut ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) Tingkat Kemiskinan, (2) Tingkat Rasio Gini, (3) Indeks Pembangunan Manusia, dan (3) ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Daerah Tertinggal dan Non Tertinggal.

Tujuan yang akan dicapai oleh Kemendes Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang berhubungan dengan transmigrasi adalah menyiapkan dan meningkatkan pembangunan serta pengembangan satuan permukiman dan desa di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan perdesaan (tujuan ke 6) dan meningkatkan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi utamanya pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan

perdesaan yang terkoneksi dengan pusat kegiatan ekonomi wilayah (tujuan ke 7).

Dengan berkembangnya industrialisasi dan globalisasi yang ditandai dengan pesatnya pembangunan di segala bidang dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi serta meningkatnya jumlah tenaga kerja, sehingga masalah hubungan industrial, kesejahteraan serta perlindungan terhadap tenaga kerja masih mewarnai masalah ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Kerawanan hubungan industrial dapat disebabkan dari berbagai faktor tidak hanya berasal dari kalangan pengusaha dan pekerja saja, akan tetapi juga bersumber dari peraturan perundangan ketenagakerjaan yang dinilai masih lemah sehingga sulit menghadapi situasi dan kondisi ketenagakerjaan sekarang, upaya memperkuat lembaga ketenagakerjaan guna penyelesaian hubungan industrial, sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja terhadap naskah kontrak kerja.

Pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, sandang dan papan, ketahanan nasional kebijakan energy alternative di kawasan transmigrasi, mendorong pemerataan penduduk, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, pendidikan serta strategi pemerataan investasi daerah dan merupakan bagian dari program mengatasi kemiskinan dan pengangguran secara berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan pembangunan bidang ketransmigrasian yang terbarukan diperlukan upaya penyiapan kawasan lahan dan pengembangan pemukiman yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan pemerataan distribusi dan pemukiman penduduk yang berimbang serta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang layak serta mempunyai kepastian hukum atas sertifikat hak milik rumah serta tanah/lahan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi saat ini, kesenjangan capaian, serta rencana capaian di masa yang akan datang, merupakan masalah pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Masalah pokok ini disebabkan oleh (1) Tingginya Angka Pengangguran (2) Rendahnya Keterampilan Tenaga Kerja (3) Kurangnya Akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan (4) Rendahnya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja (5) Masih adanya Permasalahan Lahan di kawasan transmigrasi.

Dengan latar belakang telaahan kebijakan nasional maupun provinsi dan menganalisis pokok-pokok dari prioritas nasional dan Provinsi Riau maka penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 tetap memperhatikan serta mengoptimalkan program kegiatan yang berhubungan dengan meningkatkan ketrampilan bagi para pencari kerja di Kabupaten Bengkalis baik pelatihan yang bersifat *hard skill* maupun *soft skill*, meningkatkan kesempatan dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung pelaksanaan visi pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**.

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 maka misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah:

*Misi 1: Mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian.*

Misi ini diarahkan untuk bisa memberdayakan semua potensi pendapatan daerah, termasuk aset daerah, BUMD; mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah; serta peningkatan upaya lainnya untuk memajukan perekonomian daerah dan masyarakat.

*Misi 2: Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.*

Misi ini diarahkan untuk menata birokrasi menuju *good governance* dan *clean government*; meningkatkan nilai-nilai agama di masyarakat; penguatan nilai-nilai budaya Melayu sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki karakter nilai yang kuat.

*Misi 3: Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.*

Misi ini diarahkan untuk menyediakan infrastruktur perhubungan, jalan, air, energi, dan lingkungan serta membangun wilayah perbatasan supaya masyarakatnya sejahtera.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis yang mengemban tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian memiliki tugas dan tanggung jawab pada Misi ke-1 (satu) yakni mewujudkan pengelolaan potensi keuangan daerah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian yang akan ditempuh dengan meningkatkan penanganan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian. Penjabaran Misi ke-1 merupakan acuan bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dalam merumuskan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan sesuai tugas dan fungsi dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang akan mendukung pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.

Tema pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah “Memantapkan kualitas sumberdaya manusia, infrastruktur, tatakelola pemerintahan dan perekonomian masyarakat menuju Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera”, dengan 4 (empat) prioritas pembangunan yakni:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang difokuskan pada (a) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perlindungan sosial, (b) Pelayanan kesehatan yang prima dan penuntasan stunting;
2. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, dengan fokus pembangunannya pada (a) Pemerataan akses pelayanan publik bagi masyarakat, (b) Penataan regulasi dan investasi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah;
3. Penyediaan infrastruktur yang mantap dan pengembangan wilayah, dengan fokus pembangunannya pada (a) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, (b) Penataan kawasan kumuh;
4. Peningkatan daya saing ekonomi masyarakat dan pengembangan industri kreatif daerah, dengan fokus pembangunan pada (a) Pemantapan pusat pertumbuhan ekonomi strategis, (b) Fasilitasi pengembangan industri kreatif (pelaku Usaha Mikro dan Kecil).

Dengan adanya tema pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2025 dengan prioritas-prioritas pembangunannya maka dijabarkan kedalam 5 (lima) isu strategis Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis 2025 antara lain:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
2. Peningkatan daya saing tenaga kerja;
3. Pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar kawasan, pengendalian abrasi, resiko bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan serta perbaikan kerusakan ekosistem mangrove;

4. Peningkatan perekonomian daerah berbasis masyarakat yang mendukung industri menengah dan besar;
5. Peningkatan tata kelola dan pelayanan publik.

3.1. Prioritas Daerah, Rumusan Masalah dan Rumusan Program  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis

No.	Prioritas Daerah	Rumusan Masalah	Rumusan Program
1	2	3	4
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Sosial	1. Tingginya Angka Pengangguran	1. Program Penempatan Tenaga Kerja
		2. Kurangnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Lapangan Pekerjaan	2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
		3. Rendahnya Ketrampilan Tenaga Kerja	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		4. Rendahnya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja	1. Program Hubungan Industrial
		5. Pemberdayaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Yang Belum Optimal	1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
			2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator
1	2
Meningkatkan Kontribusi Non Migas Terhadap Perekonomian Daerah	Angka Pengangguran
1. Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Utama  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	96%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB

## **BAB IV**

### **RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah proses penyusunan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai rujukan penggunaan akun belanja pada masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 mengusulkan total pagu yang direncanakan sebesar Rp. 33.591.167.357,80 (tiga puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh rupiah) sebagai dukungan pendanaan untuk 7 (tujuh) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 45 (empat puluh lima) sub kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, total pagu Rp. 19.861.712.059,80 (sembilan belas milyar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu lima puluh koma

- delapan puluh rupiah) digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan sub-sub kegiatan rutin di sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis termasuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar Rp. 12.545.351.102,00 (dua belas milyar lima ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua rupiah);
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja, total pagu anggaran sebesar Rp. 343.233.420,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) sebagai dukungan pendanaan bagi sub kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja baik makro dan mikro;
  3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, total pagu anggaran Rp. 4.681.105.201,00 (empat milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus lima ribu dua ratus satu rupiah) dengan kegiatan pokoknya Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil;
  4. Program Penempatan Tenaga Kerja, total pagu anggaran Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan kegiatan pokoknya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dengan sub kegiatan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja *online* serta *job fair*/bursa kerja dan kegiatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran yang mana kegiatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan strategis nasional;
  5. Program Hubungan Industrial, total pagu anggaran Rp. 7.202.956.709,00 (tujuh milyar dua ratus dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah) dengan kegiatan pokoknya

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota serta mengakomodir pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja bagi 34.000 (tiga puluh empat ribu) pekerja rentan yang ada di Kabupaten Bengkalis;

6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi, pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan kegiatan pokoknya Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi;
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, pagu anggaran sebesar Rp. 452.159.968,00 (empat ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan kegiatan pokoknya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Program-program unggulan yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis terdiri dari 3 (tiga) program unggulan, yakni Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi. Program kegiatan dan sub kegiatan pada Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2025 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Tabel 4.1. Rancangan Awal Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2025  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2025				Sumber Dana	Catatan Penting (dalam Penamba han)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Urusan Ketenagakerjaan											32.839.007.389,80				33.038.723.556,05
I.1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik															
I.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						Predikat SAKIP Perangkat Daerah		Nilai	BB					BB	
	2	07	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah	Kab. Bengkalis	%	100	19.861.712.059,80	DAU- DBH		100	20.049.112.777,80
	2	07	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Pengang garan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Bengkalis	%	100	394.630.744,00	DAU- DBH		100	394.630.744,00
						0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	Dokumen	3	242.006.364,00	DAU- DBH		2	300.906.364,00
						0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bengkalis	Laporan	4	152.624.380,00	DAU- DBH		4	93.724.380,00
	2	07	01	2	02	Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Adminstrasi Keuangan	Persentase adminstrasi keuangan perangkat daerah yang dilaksanakan	Kab. Bengkalis	%	100	12.706.475.820,00	DAU- DBH		100	12.706.475.820,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening						Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2025				Sumber Dana	Catatan Penting (dalam Penamba han)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
										Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
																		6
							0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bengkulu	Orang/Bulan	80	12.545.351.102,00	DAU-DBH		80	12.545.351.102,00
							0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bengkulu	Dokumen	2	161.124.718,00	DAU-DBH		2	161.124.718,00
	2	07	01	2	03			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	%	100	672.000.000,00	DAU-DBH		100	847.482.718,00
							0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bengkulu	Dokumen	2	672.000.000,00	DAU-DBH		2	847.482.718,00
	2	07	01	2	05			Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN Yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bengkulu	%	100	227.888.000,00	DAU-DBH		100	52.716.000,00
							0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Bengkulu	Paket	140	52.168.000,00	DAU-DBH		0	-
							0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bengkulu, Provinsi Riau, Indonesia	Orang	20	175.720.000,00	DAU-DBH		5	52.716.000,00
	2	07	01	2	06			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terkelolanya Administrasi Umum	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	%	100	1.953.191.330,00	DAU-DBH		100	1.953.191.330,00
							0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	Paket	2	45.035.875,00	DAU-DBH		2	45.035.875,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2025				Sumber Dana	Catatan Penting (dalam Penamba han)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	Paket	2	146.604.687,00	DAU-DBH		2	146.604.687,00
						0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	Paket	2	295.800.000,00	DAU-DBH		2	295.800.000,00
						0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	Paket	2	121.667.053,00	DAU-DBH		2	121.667.053,00
						0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Bathin Solapan	Dokumen	1	17.024.600,00	DAU-DBH		1	17.024.600,00
						0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Bathin Solapan	Laporan	600	1.021.959.115,00	DAU-DBH		600	1.021.959.115,00
						0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. Bathin Solapan	Dokumen	1	305.100.000,00	DAU-DBH		1	305.100.000,00
	2	07	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Yang Tersedia	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bengkulu	%	100	1.657.313.000,00	DAU-DBH		100	1.573.383.000,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2025				Sumber Dana	Catatan Penting (dalam Penamba han)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Unit	1	35.000.000,00	DAU- DBH		0	-
					0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Paket	5	689.487.000,00	DAU- DBH		5	640.557.000,00
					0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainny	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Bengkali s, Provinsi Riau	Unit	87	932.826.000,00	DAU- DBH		87	932.826.000,00
2	07	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan	Kab. Bengkalis	%	100	602.670.165,80	DAU- DBH		100	602.670.165,80
					0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkalis	Laporan	800	237.899.650,00	DAU- DBH		800	237.899.650,00
					0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Laporan	12	335.539.475,80	DAU- DBH		12	335.539.475,80
					0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bengkalis	Laporan	1	29.231.040,00	DAU- DBH		1	29.231.040,00
2	07	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bengkalis	%	100	1.647.543.000,00	DAU- DBH		100	1.918.563.000,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2025				Sumber Dana	Catatan Penting (dalam Penamba han)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Bengkalis	Unit	14	319.030.000,00	DAU- DBH		10	319.030.000,00
						0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Bengkalis	Unit	40	119.300.000,00	DAU- DBH		40	119.300.000,00
						0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkalis	Unit	6	624.233.000,00	DAU- DBH		6	624.233.000,00
						0010	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Bengkalis	Unit	7	584.980.000,00	DAU- DBH		7	856.000.000,00
1.2.	Meningkatkan Kontribusi Non Migas Terhadap Perekonomian Daerah																
	1.2.1							Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja		%	96				97	
2	07	02					<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja *** Program Unggulan</b>	<b>Meningkatnya Rencana Tenaga Kerja Daerah</b>	<b>Persentase Data Rencana Tenaga Kerja Daerah</b>	<b>Kab. Bengkalis</b>	<b>%</b>	<b>92</b>	<b>343.233.420,00</b>	<b>DAU- DBH</b>		<b>93</b>	<b>424.925.757,00</b>
2	07	02	2	01			Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terwujudnya Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Kab. Bengkalis	%	92	343.233.420,00	DAU- DBH		93	424.925.757,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2025				Sumber Dana	Catatan Penting (dalam Penamba han)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab. Bengkulu	Dokumen	1	200.631.463,00	DAU-DBH		1	244.023.800,00
						0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan Yang Mampu Menyusun RTK Mikro	Kab. Bengkulu	Orang	20	142.601.957,00	DAU-DBH		20	180.901.957,00
	2	07	03				<b>Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja *** Program</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditingkatkan Daya Saing dan Produktivitasnya</b>	<b>Kab. Bengkulu</b>	<b>%</b>	<b>30</b>	<b>4.681.105.201,00</b>	<b>DAU-DBH</b>		<b>35</b>	<b>4.052.720.556,25</b>
	2	07	03	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	Kab. Bengkulu	%	30	4.297.225.852,00	DAU-DBH		35	3.733.540.385,94
						0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun N	Kab. Bengkulu	Orang	270	3.996.642.339,00	DAU-DBH		200	3.345.000.000
						0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun N	Kab. Bengkulu	Lembaga	5	133.184.578,00	DAU-DBH		6	166.480.721,88

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2025				Sumber Dana	Catatan Penting (dalam Penamba han)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
					0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab. Bengkalis	Unit	6	167.398.935,00	DAU- DBH		8	222.059.664,06
2	07	03	2	02		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS Yang Dibina	Kab. Bengkalis	%	30	240.742.882,00	DAU- DBH		35	165.445.368,75
					0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Kab. Bengkalis	Lembaga	15	240.742.882,00	DAU- DBH		20	165.445.368,75
2	07	03	2	04		Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditingkatkan Produktivitasnya	Kab. Bengkalis	%	20	143.136.467,00	DAU- DBH		20	153.734.801,56
					0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Kab. Bengkalis	Perusaha an	4	143.136.467,00	DAU- DBH		6	153.734.801,56
2	07	04				<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Meningkatnya Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>	<b>Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan</b>	<b>Kab. Bengkalis</b>	<b>%</b>	<b>87</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>DAU- DBH</b>		<b>90</b>	<b>800.000.000,00</b>
2	07	04	2	03		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja	Persentase Pelayanan Antar Kerja	Kab. Bengkalis	%	20	550.000.000,00	DAU- DBH		20	550.000.000,00
					0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kab. Bengkalis	Orang	5000	200.000.000,00	DAU- DBH		5000	250.000.000,00
					0003	Job Fair /Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Kab. Bengkalis	Orang	250	350.000.000,00	DAU- DBH		80	300.000.000,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2025				Sumber Dana	Catatan Penting (dalam Penamba han)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	07	04	2	04	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran	Persentase Pekerja Migran Yang Terlindungi	Kab. Bengkulu	%	20	200.000.000,00	DAU-DBH		20	250.000.000,00
					0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia yang Terlayani sesuai Prosedur dalam Layanan Terpadu Satu Atap dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah yang Ditangani		Orang	30	200.000.000,00	DAU-DBH		10	250.000.000,00
	2	07	05			Program Hubungan Industrial	Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Kab. Bengkulu	%	97	7.202.956.709,00	DAU-DBH		100	7.711.964.465,00
	2	07	05	2	01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Bengkulu	%	20	624.623.753,00	DAU-DBH		20	801.705.607,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2025				Sumber Dana	Catatan Penting (dalam Penamba han)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Kab. Bengkalis	Perusaha an	25	115.529.286,00	DAU- DBH		30	175.010.200,00
						0002	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Kab. Bengkalis	Perusaha an	7	110.369.260,00	DAU- DBH		10	175.970.200,00
						0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab. Bengkalis	Laporan	1	398.725.207,00	DAU- DBH		1	450.725.207,00
	2	07	05	2	02		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bengkalis	%	100	6.578.332.956,00	DAU- DBH		100	6.910.258.858,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2025				Sumber Dana	Catatan Penting (dalam Penamba han)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
									Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kab. Bengkalis	Perkara	35	166.607.574,00	DAU- DBH		35	255.281.100,00
						0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Kab. Bengkalis	Perkara	27	241.297.297,00	DAU- DBH		30	295.887.700,00
						0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terseleenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Kab. Bengkalis	Asosiasi & Serikat Pekerja	23	95.993.294,00	DAU- DBH		30	195.821.600,00
						0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab. Bengkalis	Lembaga	1	221.580.333,00	DAU- DBH		1	310.414.000,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening					Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2025				Sumber Dana	Catatan Penting (dalam Penamba han)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
									Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab. Bengkulu	Orang	34.000	5.852.854.458,00	DAU-DBH		34.000	5.852.854.458,00
<b>2.</b>	<b>Urusan Ketransmigrasian</b>											<b>752.159.968,00</b>				<b>435.831.400,00</b>
1.2	Meningkatkan Kontribusi Non Migas Terhadap Perekonomian Daerah															
1.2.1	Meningkatnya Kesempatan Kerja						Tingkat Kesempatan Kerja			%	96				97	
	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>02</b>			<b>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi *** Program</b>	<b>Meningkatnya Perencanaan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Perencanaan Kawasan</b>	<b>Kab. Bengkulu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>DAU-DBH</b>		<b>100</b>	<b>150.316.000,00</b>
	3	32	02	2	01	Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terseleenggaranya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkulu	%	100	300.000.000,00	DAU-DBH		100	150.316.000,00
					0004	Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pecadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kec. Rupert	Dokumen	1	300.000.000,00	DAU-DBH		1	150.316.000,00
	<b>3</b>	<b>32</b>	<b>03</b>			<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Meningkatnya Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pembangunan Kawasan</b>	<b>Kab. Bengkulu</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>452.159.968,00</b>	<b>DAU-DBH</b>		<b>100</b>	<b>285.515.400,00</b>
	3	32	03	2	01	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terseleenggaranya Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penataan Persebaran Penduduk Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Kab. Bengkulu	%	100	452.159.968,00	DAU-DBH		100	285.515.400,00

No	Tujuan / Sasaran Strategis/ Kode Rekening	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan	2025				Sumber Dana	Catatan Penting (dalam Penamba han)	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi Kegiatan	Satuan	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		0006	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kec. Rupat	Orang	20	162.414.568,00	DAU- DBH		20	175.916.000,00
		0020	Monitoring dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Kec. Rupat	Lokasi	1	289.745.400,00	DAU- DBH		1	109.599.400,00
<b>TOTAL</b>												<b>33.474.554.956,05</b>	



Bengkalis, 19 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Bengkulu,

**SALMAN ALFARISI, S.T**

Pembina (IV/a)

NIP. 19820519 201102 1 001

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2025 disusun berdasarkan petunjuk teknis dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen perencanaan yang ada. Dengan adanya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis ini diharapkan pelaksanaan program kegiatan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang ada di Kabupten Bengkalis. Terkait hal-hal penting maka Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja 2025 dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan tetap mempedomani peraturan perundangan-undangan.

Demikianlah Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis tahun 2025 ini disusun. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan diharapkan dari semua unsur yang terlibat dapat memberikan masukan demi penyempurnaan dokumen ini.



Bengkalis, 19 Januari 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Kabupaten Bengkalis

**SALMAN ALFARISI, S.T**

Pembina (IV/a)

NIP. 19820519 201102 1 001